

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju yaitu sebagai penggerak perekonomian. Dengan melalui bank unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dapat menyalurkan dananya ke unit-unit ekonomi yang mengalami kekurangan dana. Sejak diberlakukannya paket deregulasi perbankan tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur beberapa hal antara lain : kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*), batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*), kualitas aktiva produktif (KAP) dan penilaian tingkat kesehatan bank, maka pengelolaan perbankan Indonesia dihadapkan pada berbagai peluang sekaligus ancaman dalam menghadapi persaingan bank yang semakin ketat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/Kep/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, maka semua bank yang beroperasi di wilayah negara Indonesia wajib melakukan penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Aktiva produktif yang dimaksud dalam Surat Edaran (SE) tersebut adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi : kredit yang diberikan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank-bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri (kecuali penanaman dana dalam bentuk giro), dan penyertaan.

Sementara itu besarnya pembentukan PPAP berdasar ditentukan sesuai dengan pengelompokan aktiva produktif, yaitu untuk kelompok pertama dikenal dengan kolektibility 1 lancar, tunggakan 1 sampai 3 kali maka besarnya PPAP 0.5%. Kolektibility 2 kurang lancar kriteria tunggakan 4 sampai 6 kali maka besarnya PPAP adalah 10%, kemudian kolektibility 3 diragukan dengan tunggakan 7 sampai 12 kali dan PPAP sebesar 50% serta kolektibility 4 dengan kategori macet tunggakan lebih dari 13 kali, maka besarnya PPAP 100%..

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat, maka diketahui bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus, dimana PPAP umum besarnya 0.5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. Dan PPAP Khusus ditetapkan paling kurang sebesar 10% dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan dan 50% dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan serta 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Sementara rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat. Sejak periode krisis sampai dengan saat ini CAR menjadi acuan utama dalam menentukan kesehatan bank (SK Dir BI April 1999), dimana pada tanggal 9 Januari 2004, Gubernur Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu blueprint mengenai arah dan tatanan perbankan nasional ke depan. dimana salah satu program API adalah mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum (termasuk

BPD) menjadi Rp 100 miliar dengan CAR minimum 8% selambat-lambatnya pada tahun 2010. Hal lain juga disebabkan karena rata-rata CAR selama periode krisis sampai dengan akhir 2001 hanya mencapai 4% dan sejak awal 2002 bank diwajibkan memenuhi CAR minimal 8%. Kebijakan ini berawal dari kebijakan Bank Dunia (*World Bank*) yang ditindak-lanjuti oleh Bank Indonesia dengan kebijakan 29 Mei 1993 (Pakmei, 1993). Besarnya CAR minimal 8% tersebut berlaku bagi seluruh bank secara internasional.

Di sisi lain perubahan kondisi perbankan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor termasuk kondisi ekonomi dan moneter berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup perbankan Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin besarnya proporsi kredit bermasalah/macet dan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Menyebabkan kondisi bank yang semakin sulit untuk meneruskan kegiatannya, bahkan Bank Indonesia tidak mempunyai alternatif lain untuk mengatasi masalah tersebut selain dengan melakukan penutupan usaha bank dengan berbagai macam istilah, seperti: likuidasi, pembekuan operasi (Bank Beku Operasi– BO), penghentian kliring dan Bank.

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank di Indonesia yang mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil dari bank umum ditujukan untuk mempermudah masyarakat di daerah mendapatkan dana dalam mengembangkan usahanya. Salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yaitu BPR yang ada di Propinsi Riau. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan mempertahankan kelangsungan usaha dari bank tersebut, kepercayaan dari masyarakat pada bank sangat penting.

Untuk dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat, pengelola bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang

cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Di samping itu bank juga mengumumkan posisi keuangannya pada periode-periode tertentu agar masyarakat dapat mengetahui posisi keuangan dari bank tersebut.

Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank atau kinerja dari bank. Penilaian kinerja perusahaan sangat penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemilik perusahaan, dan masyarakat umum, untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian kinerja tersebut umumnya dapat dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas

Selanjutnya perkembangan penyaluran kredit yang terjadi pada masing-masing BPR di Propinsi Riau setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mengakibatkan tingginya pendapatan bunga dan kredit bermasalah menjadi semakin besar terhadap jumlah dari penyaluran kredit tersebut. Dengan peningkatan kredit bermasalah akan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memupuk cadangan kemungkinan kerugian yang disebut PPAP sehingga menghambat terbentuknya laba yang seharusnya diterima. Kredit bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif tersebut mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan sehingga kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang relatif menurun.

Kondisi yang seharusnya terjadi apabila jumlah kredit bermasalah dan penyisihan penghapusan aktiva produktif naik maka laba sebelum pajak seharusnya turun. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pada BPR di Propinsi Riau, pada tahun 2011 laba sebelum pajak menurun, penurunan tersebut diikuti dengan menurunnya penyisihan penghapusan aktiva produktif tetapi jumlah kredit yang disalurkan mengalami kenaikan. Penurunan laba ini

terutama disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif di tahun 2008 yang menyebabkan tingginya inflasi dan tingkat suku bunga dan pada akhirnya meningkatkan total NPL. Melihat kondisi pada BPR di Propinsi Riau dalam perolehan laba, dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Laba Sebelum Pajak Pada
BPR di Propinsi Riau Tahun 2007-2011

Tahun	Pendapatan (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)
2007	17.947.812.994	6.523.765.540
2008	20.050.012.140	5.794.718.378
2009	27.902.710.799	8.165.177.085
2010	34.090.294.563	9.937.033.324
2011	37.678.857.013	8.582.781.069

Sumber : Laporan BPR di Propinsi Riau, 2012

Laba sebelum pajak pada tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun 2009. Peningkatan signifikan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih, terutama dari pendapatan bunga kredit, serta peningkatan pendapatan operasional lainnya dari provisi dan komisi serta pendapatan premi asuransi tetapi naiknya laba sebelum pajak tersebut tidak diikuti dengan turunnya jumlah kredit yang disalurkan dan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang mengalami kenaikan pada tahun 2011.

Kondisi yang seharusnya terjadi apabila laba sebelum pajak naik maka jumlah kredit yang disalurkan dan penyisihan penghapusan aktiva produktif seharusnya menurun. Apabila bank-bank mampu menekan rasio kredit bermasalah di bawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar karena bank-bank akan menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Kualitas Aktiva Produktif terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Kualitas Aktiva Produktif terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau
2. Mengetahui pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan penulis tentang manajemen keuangan khususnya dalam melihat dampak kualitas aktiva produktif dan tungakan kredit modal kerja terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau.

2. Bagi Perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya mengenai PPAP dan Kredit bermasalah (tunggakan kredit modal kerja) agar perusahaan dapat merencanakan laba dengan lebih efektif dan efisien, untuk mendapatkan laba bersih yang lebih stabil dan meningkat setiap tahunnya
3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi penulis yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini.